



# Dekranasda Gandeng Swasta Gelar Pelatihan

## UMKM Kerajinan di Yogya Masih Terkendala Pemasaran

**YOGYA, TRIBUN** - Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang kerajinan di Kota Yogyakarta masih terkendala pemasaran serta akses mereka ke perbankan sulit lantaran tidak punya jaminan untuk mengajukan kredit.

"Manajemen keuangan para pelaku UMKM di bidang kerajinan di Kota Yogyakarta juga masih jelek sehingga belum bisa dibaca oleh analis," terang Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Yogyakarta, Tri Kirana Muslidatun, Senin (25/6).

Ia melanjutkan, masalah lain yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di bidang kerajinan di Kota Yogyakarta adalah soal produksi. Mereka belum mampu mengelola produksi secara bagus dan tepat waktu sehingga masih gagap ketika menerima banyak order.

"Pengembangan kreativitas pemasaran mereka pun sangat minim. Karenanya, saya berharap, para pelaku UMKM di bidang kerajinan di Kota Yogyakarta bisa kreatif guna menjawab tantangan masa depan pada era digital seperti sekarang," tegas Ana, sapaannya.

Menurutnya, Dekranasda Kota Yogyakarta telah bekerja sama dengan berbagai pihak, baik swasta maupun universitas, untuk memberi beragam pelatihan, pendampingan, hingga memfasilitasi pameran untuk

**Untuk menjadi pengusaha besar, mereka harus mampu menjual. Untuk mampu menjual, mereka harus punya dasar-dasar pemasaran.**

**Tri Kirana Muslidatun**  
Ketua Dekranasda Kota Yogyakarta

meningkatkan kelas para pelaku UMKM tersebut.

"Untuk menjadi pengusaha besar, mereka harus mampu menjual. Untuk mampu menjual, mereka harus punya dasar-dasar pemasaran. Kekompakan antar-pelaku UMKM juga punya peran penting dalam meningkatkan nilai dari sebuah usaha kerajinan," papar Ana.

**UMKM Online** Sejatinnya, Dekranasda Kota Yogyakarta sudah melakukan inovasi dengan menghadirkan program UMKM Online. Namun, program itu nyatanya belum cukup membantu penjualan produk para pelaku UMKM di bidang kerajinan di Kota Yogyakarta.

"UMKM Online kurang efektif lantaran para pelaku

**Pajak UMKM** Menyoal UMKM, baru-baru ini Presiden Joko Widodo memberlakukan tarif baru Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi UMKM sebesar 0,5 persen dari omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun. Kebijakan itu berlaku efektif per 1 Juli 2018.

Perubahan kebijakan mengenai pungutan pajak UMKM oleh Presiden mendapat respons dari promotor musik dari Kota Yogyakarta, Anas Syahrul Alimi. Ia mengatakan, sekarang memang saatnya ada peraturan tentang pajak ton-tonan di daerah.

Menurutnya, besaran pajak 35 persen sangat bertentangan dengan semangat Nawacita yang ingin menumbuhkan ekonomi daerah lewat kegiatan industri kreatif. "Besaran pajak ton-tonan 35 persen sangat tidak mendukung semangat Nawacita," ucapnya.

Anas yakin kegiatan industri kreatif yang bertumbuh bisa berdampak positif bagi daerah. "Saya meminta kepada pemangku kebijakan di daerah supaya lebih peka terkait persoalan tersebut," katanya. (wan/rbt)



**GELAR PRODUK** - Para pelaku UMKM menggelar produk pada acara temu anggota Dekranasda Kota Yogyakarta di Aula Mandira Baruga, Senin (25/6).

1. Dinas Kop. Naker & UMKM  
 2. Dekranasda Kota YK  
 - Netaf

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. TP. PKK/ Dekranasda	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 28 November 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005